

**MENILIK ISU LINGKUNGAN DAN KELESTARIAN ALAM DALAM UU IKN  
MELALUI LINGUISTIK KORPUS**

*Investigating Environmental and Sustainability Issues in the Law on IKN  
through Corpus Linguistics*

**Bayu Permana Sukma, Devi Ambarwati Puspitasari, Winci Firdaus**

Badan Riset dan Inovasi Nasional  
Jalan Gatot Subroto No.10, Kuningan Bar., Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan,  
Daerah Khusus Jakarta 12710

Pos-el: [bayu025@brin.go.id](mailto:bayu025@brin.go.id), [devi.ambarwati.puspitasari@brin.go.id](mailto:devi.ambarwati.puspitasari@brin.go.id),  
[winci.firdaus@brin.go.id](mailto:winci.firdaus@brin.go.id)

Naskah Diterima Tanggal 11 Desember 2023 — Direvisi Akhir Tanggal 3 Desember 2024 — Disetujui Tanggal 15 Desember 2024  
doi: <https://doi.org/10.26499/rnh.v13i2.6838>

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui sejauh mana isu lingkungan dan kelestarian alam diakomodasi di dalam UU No. 3 Tahun 2022 tentang IKN dengan menggunakan pendekatan linguistik korpus. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah teks lengkap dari UU No. 3 Tahun 2022 tentang IKN, yang mencakup seluruh naskah undang-undang, termasuk preambule, pasal-pasal, dan lampiran yang terdiri atas 1.099 token dan mencapai 8.653 frekuensi kata. Penelitian ini memanfaatkan penggunaan alat bantu, yaitu AntConc versi 4.2. Teknik analisis yang diterapkan adalah analisis frekuensi kata, kata kunci, konkordansi, dan N-gram. Hasil temuan dan analisis data statistik terkait kosa kata dengan topik lingkungan menunjukkan bahwa tidak ditemukan signifikansi topik lingkungan yang terfasilitasi dalam isi Undang-undang No.3 Tahun 2023, khususnya peraturan terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Satu-satunya kata kunci yang muncul di seratus hits pertama hanyalah kata 'lingkungan' dan berada di peringkat ke-78, jauh di bawah kata 'otorita' dan 'pemerintahan' yang berada di area sepuluh besar, dan kata kunci terkait pembangunan yang berada di peringkat 20 sampai 30. Kata kunci terkait kelestarian alam lainnya ditemukan pada peringkat ke-200 hingga ke-800, dari total 1.099 token yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa isu lingkungan dan kelestarian alam tidak banyak dibahas dalam UU IKN karena jumlah kemunculannya tidak sebesar kata-kata kunci lain yang terkait dengan pemerintahan dan pembangunan.

**Kata-kata kunci:** bahasa dalam produk hukum, IKN, lingkungan, linguistik korpus, Nusantara

**Abstract**

*This study aims to analyze and determine the extent to which environmental issues and natural sustainability are accommodated in Law no. 3 of 2022 concerning IKN using a corpus linguistics approach. The data collected in this research is the complete text of Law no. 3 of 2022 concerning IKN, which covers the entire text of the law, including preambles, articles and attachments consisting of 1,099 tokens and reaching 8,653 word frequencies. This research utilizes the use of tools, namely AantConc version 4.2. The analysis techniques applied are word frequency analysis, keywords, concordance, and N-grams. The results of the findings and analysis of statistical data related to vocabulary on environmental topics show that there is no significance in environmental topics that are facilitated in the contents of Law No. 3 of 2023, especially regulations related to law enforcement against environmental violations. The only keyword that appeared in the first hundred hits was the word 'environment' and it was ranked 78th, far below the words 'authority' and 'government' which were in the top ten area, and development-related keywords which were in the top ten, ranked 20th to 30th. Other keywords related to natural sustainability were found in ranks 200th to 800th, out of a total of 1,099*

*existing tokens. It shows that environmental and sustainability issues are not discussed in a sufficient proportion since their occurrence is significantly fewer than the frequency of the other keywords related to government and development.*

**Keywords:** language in legal product, IKN, environment, corpus linguistics, Nusantara

**How to Cite:** Sukma, Bayu Permana, Devi Ambarwati Puspitasari, Winci Firdaus. (2024). Menilik Isu Lingkungan dan Kelestarian Alam dalam UU IKN melalui Linguistik Korpus. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*. 13(2). 255—267. doi: <https://doi.org/10.26499/rmh.v13i2.7248>

---

## PENDAHULUAN

Setelah melalui perdebatan panjang, pemerintah Indonesia akhirnya merealisasikan wacana pemindahan ibu kota negara. Ibu kota baru yang diberi nama Nusantara itu direncanakan akan dibangun di atas lahan seluas 58.570 ha (Otorita IKN, 2023b) yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pemilihan lokasi di wilayah pulau Kalimantan bagian timur didasarkan pada beberapa pertimbangan, di antaranya aksesibilitas, ketersediaan infrastruktur, ketersediaan lahan dan sumber daya air, ketersediaan dan kemampuan lahan, struktur kependudukan yang heterogen, serta dukungan pertahanan (Otorita IKN, 2023b). Selain itu, pemilihan pulau Kalimantan dinilai tepat dari segi manajemen penanggulangan kebencanaan (Wijaya, 2019 dalam Kurniadi, 2019). Kehadiran ibu kota baru di wilayah Provinsi Kalimantan Timur itu juga diharapkan dapat mendorong perkembangan dan pemerataan perekonomian, tidak hanya pada level lokal tetapi juga nasional (Otorita IKN, 2023b).

Namun demikian, beberapa pihak mengkritik kebijakan tersebut. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan dinilai dapat menimbulkan lebih banyak masalah daripada manfaat yang dihasilkannya. Masalah ekonomi, sosial, politik, hingga lingkungan diperkirakan akan muncul di wilayah ibu kota baru. Di antara beberapa aspek yang disebutkan, masalah lingkungan menjadi isu yang sangat banyak diperbincangkan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari peran penting pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia yang notabene masih memiliki lahan hutan tropis yang luas. Pembangunan wilayah ibu kota negara yang masif dikhawatirkan akan memicu deforestasi dan perusakan alam besar-besaran, yang pada gilirannya mengancam ekosistem dan biodiversitas di wilayah Kalimantan umumnya dan Kalimantan Timur khususnya (Sa'adah et al., 2022; Fristikawati et al., 2022; Ramadhani, 2023). Selain itu, kerusakan alam juga dapat mengancam eksistensi masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya dari hutan.

Untuk melihat sejauh mana perhatian pemerintah terhadap berbagai dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pembangunan IKN, tilikan terhadap dokumen resmi dan payung hukum IKN perlu dilakukan. Dengan melakukan analisis kebahasaan melalui pendekatan linguistik korpus terhadap dokumen tersebut, sejauh mana isu lingkungan dan isu keberlanjutan mendapat tempat dalam wacana pembangunan IKN dapat ditelusuri. Dalam tulisan ini, dokumen resmi yang digunakan sebagai sumber data dibatasi hanya pada UU No. 3 Tahun 2022. Pemilihan sumber data ini didasarkan pada urgensi undang-undang tersebut sebagai dasar hukum primer dalam pembangunan IKN.

UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Februari 2022, yang menandai dimulainya proses pembangunan IKN. UU IKN terdiri atas 11 Bab, 44 Pasal, dan 2 Lampiran (Peta Delineasi dan Pokok-Pokok Rencana Induk IKN), yang mengatur berbagai hal terkait: 1) rencana induk; 2) susunan pemerintahan; 3) pembagian wilayah; 4) penataan ruang dan lingkungan hidup; 5) pemindahan kedudukan lembaga negara; 6) pendanaan dan pengelolaan anggaran; 7) partisipasi masyarakat; dan 8) pemantauan dan peninjauan (Biro Hukum Kemenkeu, 2022).

Sejumlah penelitian telah menggunakan metode linguistik korpus untuk menganalisis dokumen-dokumen hukum (Sagredos, 2019; Sopjani & Hamiti, 2023), termasuk undang-undang, peraturan, dan kebijakan pemerintah (Narayanan et al., 2021; Rukayah et al., 2023; Toli & Murtagh, 2020). Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kata-kata, frasa, dan konsep-konsep yang

berkaitan dengan lingkungan dan keberlanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu-isu lingkungan yang paling sering muncul dalam dokumen-dokumen hukum meliputi perlindungan alam, pengelolaan sumber daya alam, perubahan iklim, dan pemulihan ekosistem. Hal ini mencerminkan fokus pemerintah dan legislator terhadap masalah-masalah lingkungan yang mendesak.

Dokumen hukum sering menggunakan istilah teknis dan definisi tertentu terkait berbagai hal. Bahasa yang digunakan dalam dokumen hukum memengaruhi pemahaman, interpretasi, dan implementasi undang-undang serta peraturan. Pemahaman ini dapat memengaruhi cara kebijakan diterapkan dalam praktik. Melalui analisis linguistik korpus, ketentuan-ketentuan hukum yang tidak konsisten atau ambigu dapat diidentifikasi (Solan & Gales, 2018). Hasil analisis tersebut dapat menjadi dasar untuk merevisi undang-undang guna meningkatkan konsistensi dan kejelasan. Selain itu, bahasa yang digunakan dalam dokumen hukum dapat memengaruhi persepsi dan reaksi masyarakat terhadap undang-undang serta kebijakan. Bahasa yang lebih jelas dan persuasif dapat memengaruhi dukungan publik terhadap tindakan-tindakan yang berkaitan dengan masalah tertentu.

Dalam konteks isu lingkungan, penelitian terkait penelusuran isu lingkungan dalam dokumen hukum dapat memberikan wawasan penting tentang bagaimana bahasa digunakan dalam konteks hukum lingkungan dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi pemahaman, kebijakan, dan tindakan terkait lingkungan. Analisis bahasa membantu mengidentifikasi isu-isu lingkungan yang mendesak, meningkatkan konsistensi hukum, dan memahami peran bahasa dalam memengaruhi perilaku serta persepsi masyarakat terhadap lingkungan.

Berpijak pada latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui sejauh mana isu lingkungan dan kelestarian alam diakomodasi dalam UU IKN dengan menggunakan pendekatan linguistik korpus. Secara khusus, terdapat dua pertanyaan penelitian yang akan dijawab, yaitu: 1) bagaimana persentase kemunculan kata kunci terkait lingkungan dan kelestarian alam dalam teks UU IKN?; dan 2) apa implikasi persentase kemunculan kata kunci tersebut terhadap isu lingkungan dan kelestarian di wilayah IKN?

## **LANDASAN TEORI**

### **Peran Bahasa Indonesia sebagai Komponen Keamanan Geopolitik Negara**

Identitas nasional dibentuk sebagian besar oleh bahasa. Dengan statusnya sebagai bahasa resmi dan lingua franca negara, bahasa Indonesia memainkan peran penting dalam menyatukan berbagai etnis, budaya, dan agama di Indonesia (Ramadhani, 2018). Stabilitas dalam konteks geopolitik membutuhkan komitmen yang kuat dan bersatu (Al Fajri, 2019; Susiati & Iye, 2018). Komunikasi dan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan dalam pembentukan IKN yang melibatkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke tempat baru di Kalimantan Timur. Bahasa Indonesia memfasilitasi proses ini dan mencegah konflik komunikasi (Nuryanto, 2015).

Peraturan dibuat selama proses pembentukan IKN (Khair, 2022). Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi dalam peraturan dan perundang-undangan Indonesia. Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dalam diplomasi internasional karena menjadi anggota berbagai organisasi internasional dan berpartisipasi dalam berbagai forum geopolitik. Hal ini dilakukan untuk membantu negosiasi, perjanjian, dan kerja sama internasional terkait masalah seperti perdagangan, keamanan, dan lingkungan.

Undang-undang No.3 Tahun 2022 tentang IKN adalah dokumen hukum yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi dalam penyusunan undang-undang ini dan penting untuk memahaminya untuk menghindari ketidakjelasan dan konflik terkait pelaksanaan IKN. Bahasa juga merupakan alat hukum penting dalam konteks pembentukan Ibu Kota Nusantara dan untuk menjaga stabilitas dan keamanan geopolitik negara (Fristikawati et al., 2022; Nugroho, 2022). Memahami bahasa ini sangat penting untuk menyukseskan pelaksanaan kebijakan IKN dan menjaga stabilitas dinamika geopolitik Indonesia, termasuk masalah

kelestarian alam dan lingkungan.

### **Peran Linguistik Korpus dalam Menelusuri Isu Lingkungan dan Kelestarian Alam dalam Suatu Teks Undang-Undang**

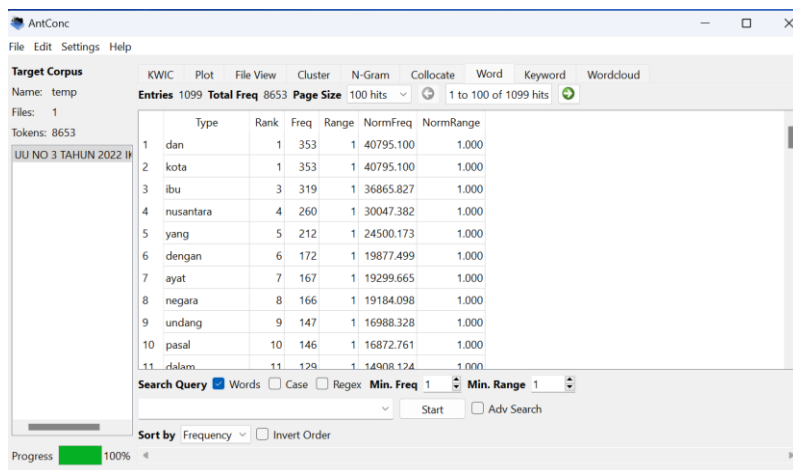
Linguistik korpus memainkan peran yang signifikan dalam mengeksplorasi isu-isu lingkungan dan kelestarian alam dalam suatu teks hukum. Linguistik korpus memungkinkan untuk melakukan penelusuran melalui analisis Bahasa (Al Fajri, 2019; Shiroda et al., 2023) yang digunakan dalam undang-undang dan dokumen-dokumen terkait lingkungan. Penelusuran suatu topik tertentu dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kata-kata kunci, frasa, dan konsep-konsep tertentu (Kania, 2022; Puspitasari & Sukma, 2022), seperti konsep yang berkaitan dengan lingkungan dan keberlanjutan. Dengan menganalisis sejumlah besar teks, linguistik korpus dapat membantu dalam memahami prioritas dan fokus pemerintah (Baayen, 2008), khususnya dalam preferensi topik tertentu, seperti konteks lingkungan. Proses ini dapat membantu mengidentifikasi isu-isu yang paling penting dalam suatu teks (Sagredos, 2019).

Linguistik korpus memungkinkan peneliti untuk melihat perubahan dalam bahasa dan fokus topik tertentu dalam suatu teks dari waktu ke waktu (Altoaimy, 2018; Lutzky & Lawson, 2019). Dalam konteks lingkungan, proses ini dapat mengungkapkan bagaimana isu-isu lingkungan telah berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Suatu teks undang-undang sering kali menggunakan istilah-istilah teknis dan definisi tertentu. Linguistik korpus dapat membantu dalam mengidentifikasi penggunaan dan definisi istilah-istilah yang penting untuk interpretasi yang akurat (Shiroda et al., 2023). Melalui analisis linguistik korpus, ketentuan lingkungan yang tidak konsisten atau ambigu dalam undang-undang dapat diidentifikasi. Dalam proses yang Panjang, hasil analisis ini dapat menjadi landasan untuk merevisi undang-undang agar lebih konsisten dan jelas.

Bahasa yang digunakan dalam undang-undang dan dokumen hukum dapat memengaruhi persepsi publik terhadap isu-isu tertentu, termasuk isu lingkungan dan pelestarian alam. Linguistik korpus dapat membantu menganalisis bagaimana bahasa ini memengaruhi persepsi dan reaksi masyarakat terhadap undang-undang dan kebijakan lingkungan. Dengan demikian, linguistik korpus adalah alat penting dalam menggali informasi (Islamiah & Al Fajri, 2019), tren (Carpi & Iacus, 2020), dan isu-isu tertentu (Al Fajri, 2017). Hal ini membantu dalam memahami pemahaman, fokus, dan evolusi hukum yang pada gilirannya dapat membantu dalam perumusan undang-undang yang lebih efektif dan berkelanjutan, seperti mendukung kelestarian alam.

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode linguistik korpus. Metode ini merupakan pendekatan linguistik yang dapat digunakan untuk menganalisis teks besar secara sistematis (Chen & Flowerdew, 2018; Meyer, 2023). Dalam konteks penelitian ini, metode linguistik korpus digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana isu lingkungan diterjemahkan dan direpresentasikan dalam teks UU No. 3 Tahun 2022. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah teks lengkap dari UU No. 3 Tahun 2022 tentang IKN, yang mencakup seluruh naskah undang-undang, termasuk preambule, pasal-pasal, dan lampiran yang terdiri atas 1.099 token dan mencapai 8.653 frekuensi kata. Untuk menganalisis teks tersebut, penelitian ini memanfaatkan penggunaan alat bantu analisis korpus yang dapat memproses teks dalam jumlah besar, yaitu AntConc versi 4.2.



**Gambar 1.**  
Hasil Ekstraksi Token Menggunakan AntCon

Berdasarkan data token, penelitian ini tidak melakukan sortir dengan tidak melibatkan kata hubung atau konjungsi (*function words*) untuk mendapatkan data yang lebih representatif terkait dengan frekuensi untuk proses analisis. Teknik analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

**Analisis Frekuensi Kata:** Mengidentifikasi kata-kata yang paling sering muncul dalam teks dan mengevaluasi peran mereka dalam representasi isu lingkungan.

**Analisis Kata-kata Kunci:** Identifikasi kata-kata kunci digunakan untuk melihat bagaimana frekuensi dan persebaran kata tertentu yang menjadi fokus investigasi (Sopjani & Hamiti, 2023). Kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini adalah kata kunci terkait dengan isu pelestarian alam yang terdiri dari dua jenis, yaitu kata dan frasa. Kata kunci ini dipilih berdasarkan penelitian terdahulu terkait kelestarian alam (Pérez-Cornejo et al., 2023; Shruti et al., 2021), dimana teks-teks yang memuat isu kelestarian alam memunculkan kata kunci berikut dengan frekuensi yang tinggi (Rukayah et al., 2023; Toli & Murtagh, 2020).

**Tabel 1.**  
Daftar Kata Kunci Bertema Kelestarian Alam

Kata Kunci	
Kata	Frasa
1. hijau	1. keanekaragaman hayati
2. hutan	2. lingkungan hidup
3. pohon	3. desain hijau
4. biofuel	4. teknologi hijau
5. konservasi	5. sumber daya alam
6. lingkungan	6. energi terbarukan
7. ekosistem	7. konsumerisme yang bertanggung jawab
8. air	8. desain berkelanjutan
9. pohon	9. pembangunan berkelanjutan
10. alam	10. pertanian berkelanjutan

**Analisis Konkordansi:** Menampilkan konteks penggunaan kata-kata tertentu dalam teks untuk memahami bagaimana isu lingkungan dibahas.

Analisis N-gram: Melihat pola urutan kata yang mungkin mengungkapkan hubungan dan representasi isu lingkungan dalam teks.

Dengan menggunakan metode linguistik korpus dan teknik analisis kualitatif, penelitian ini menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana isu lingkungan tercermin dalam UU No. 3 Tahun 2022 tentang IKN, dan bagaimana terminologi serta representasi linguistik berperan dalam konteks ini (Petchprasert, 2021).

## PEMBAHASAN

### Frekuensi Kemunculan Kata Kunci terkait Lingkungan dan Kelestarian Alam dalam UU IKN

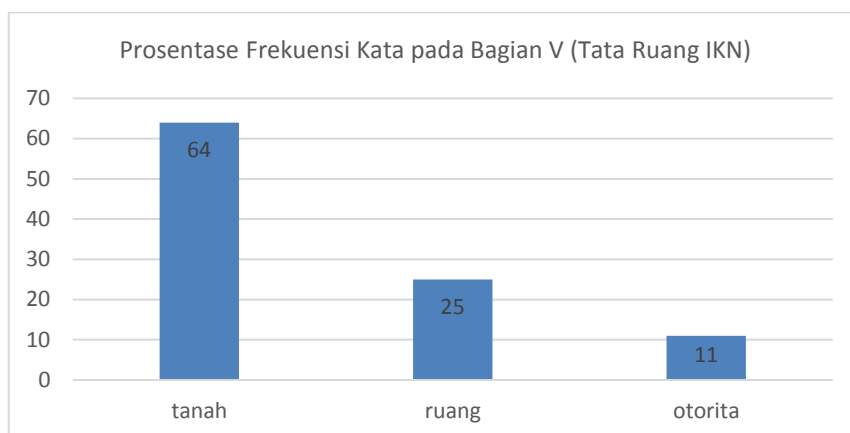
Konteks umum dan tujuan dari UU No.3 Tahun 2023 adalah sebagai sumber yang mengatur tentang pembangunan IKN dan undang-undang ini merupakan acuan peraturan hukum turunannya, baik Peraturan Presiden, Perka Otorita IKN, dan lain-lain (Otorita IKN, 2023a). Untuk mengetahui apakah undang-undang ini mengakomodasi kata-kata terkait kelestarian alam dalam konteks dokumen legal, maka investigasi pertama dilakukan dengan menganalisis daftar kata dan frekuensinya. Kedua analisis ini diperlukan sebagai langkah awal dalam memahami sebuah teks dengan perspektif korpus (Tribble & Jones dalam Baron et al., 2009). Fitur pencarian dari Antconc digunakan dalam dokumen menggunakan kata kunci yang telah ditentukan pada bagian metode, yaitu 20 kata dan frasa terkait kelestarian alam. Selain itu, identifikasi pasal-pasal atau bagian-bagian tertentu dalam dokumen yang berkaitan dengan kelestarian alam juga dilakukan agar dapat dilakukan analisis lebih mendalam untuk memahami isi dan implikasi dari setiap pasal tersebut dalam konteks kelestarian alam. Investigasi selanjutnya dilakukan untuk mengetahui sejauh mana undang-undang ini memuat ketentuan yang mendukung atau melindungi alam, sumber daya alam, atau lingkungan hidup secara umum.

Hasil analisis dokumen dan penelusuran daftar kata menunjukkan ada delapan bagian penting dalam UU No.3 tahun 2023 ini, yaitu terkait desain induk, kewenangan, pembagian wilayah, tata ruang, pemindahan, pendanaan, partisipasi masyarakat, peraturan dan ketentuan umum lainnya. Tidak terdapat satu Bab atau bagian khusus yang memuat tentang kelestarian alam. Satu-satunya pembahasan terkait alam ditemukan pada Bab V, yaitu tentang penataan ruang, pertanahan dan pengalihan hak atas tanah, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan pertahanan dan keamanan. Berdasarkan data hasil penelusuran daftar kata, Bab V ini merupakan bagian yang memiliki daftar kata dan frekuensi terbanyak setelah ketentuan umum dan desain induk IKN. Hal tersebut tampak pada tabel berikut.

**Tabel 2.**

Jumlah Token (Jenis Kata) dan Frekuensi Kata pada Setiap Bagian UU No.3 Tahun 2022 Tentang IKN

Bagian	Token	Total Frekuensi Kata
Ketentuan Umum	312	1235
Desain Induk	232	833
Kewenangan	156	437
Pembagian Wilayah	30	37
Tata Ruang	202	674
Pemindahan	64	138
Pendanaan	234	1167
Partisipasi Masyarakat	47	55



**Gambar 2.**  
Tiga Kata dengan Frekuensi Tertinggi pada Bagian V (Tata Ruang IKN)

Untuk menganalisis lebih detail preferensi topik pada Bab V, investigasi dilakukan pada tiga kata dengan frekuensi tertinggi, yaitu kata ‘tanah’, ‘ruang’, dan ‘otorita’. Kata tanah memiliki frekuensi tertinggi dengan muncul sebanyak 16 kali dari keseluruhan *hits* yang muncul pada Bab V ini, yaitu 202 token. Berdasarkan data ini, penelusuran selanjutnya dilakukan untuk melihat kolokasi kata tanah dalam dokumen, khususnya pada Bab V. Pada umumnya kata tanah berkolokasi dengan kata terkait lingkungan dan alam. Berikut hasil penelusuran kolokasi, yaitu kata dan frasa yang muncul tepat di sebelah kanan dan kiri dari sebuah kata kunci yang dipilih.

**Tabel 3.**  
Kolokasi Kata ‘tanah’ pada Bab V (Tata Ruang IKN)

pengadaan	<b>tanah</b>	bagi pembangunan	70%
pembelian	<b>tanah</b>	di Ibu Kota Nusantara	20%
pengalihan hak atas	<b>tanah</b>	sebagaimana Pasal	10%

**Tabel 4.**  
Kolokasi Kata ‘ruang’ pada Bab V (Tata Ruang IKN)

rencana tata	<b>ruang</b>	KSN di IKN	85%
rencana tata	<b>ruang</b>	Wilayah Nasional / Kota	12%
rencana tata	<b>ruang</b>	Pulau Kalimantan	3%

**Tabel 5.**  
Kolokasi Kata ‘otorita’ pada Bab V (Tata Ruang IKN)

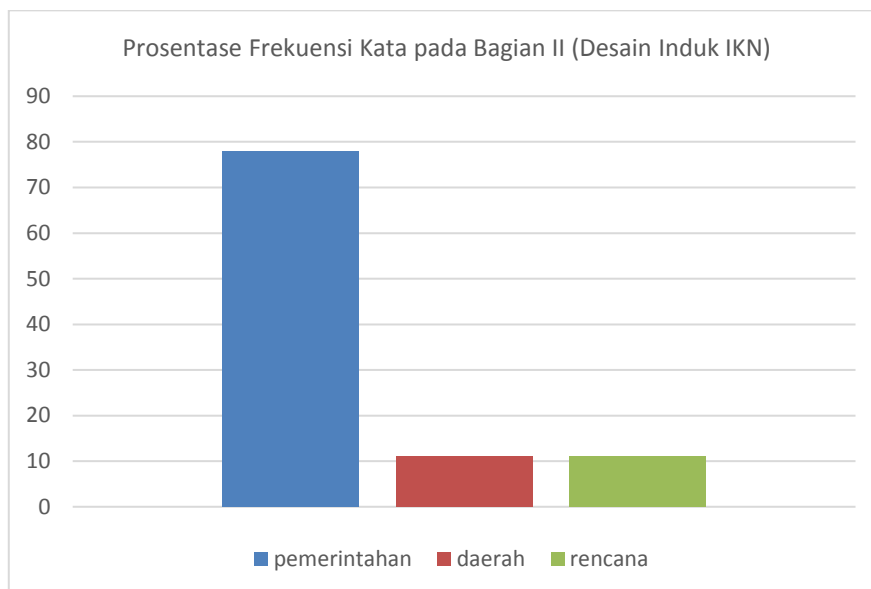
Peraturan Kepala	<b>otorita</b>	di Ibu Kota Nusantara	80%
disahkan oleh	<b>otorita</b>	di Ibu Kota Nusantara	10%
dilakukan oleh	<b>otorita</b>	di Ibu Kota Nusantara	10%

Berdasarkan hasil penelusuran kolokasi dan n-gram, n-unit kata tanah menunjukkan preferensi tema terkait pembangunan dan peraturan pemerintah. Tidak ditemukan kelompok kata terkait

lingkungan yang mendominasi pada Bab V yang khusus membahas tata ruang di IKN. Tidak ditemukan kelompok kata terkait ‘ruang terbuka hijau’ atau pelestarian lingkungan yang berhubungan dengan tanah. Kata ‘tanah’ di bagian ini lebih banyak membahas tentang wilayah dan terkait pemilikan aset (property). Maka kata ‘tanah’ dan ‘ruang’ yang dibahas pada bagian tata ruang IKN ini berkisar pada tema-tema peraturan pemerintah tentang hak kepemilikan atas aset tanah di IKN yang nanti akan diatur oleh Otorita IKN.

Tidak ditemukan data yang secara khusus menyebutkan wilayah atau kawasan hijau yang harus dilindungi atau diatur kepemilikannya. Dengan kata lain, tata ruang di IKN berada pada tanah yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dari tengah hingga batas wilayah IKN. Tidak disebutkan keharusan menyisakan atau melindungi wilayah konservasi, misalnya. Oleh karena itu, ruang terbuka hijau kemungkinan dibuat berdasarkan desain induk IKN, bukan berdasarkan kondisi bentang alam yang ada saat ini. Ruang terbuka hijau, kawasan konservasi, dan wilayah-wilayah ramah lingkungan lainnya kemungkinan besar direkayasa berdasarkan desain induk dan kebutuhan pembangunan.

Investigasi selanjutnya dilakukan pada bagian kedua atau Bab II yang secara khusus memuat pembentukan, kekhususan, kedudukan, cakupan wilayah, dan rencana induk IKN. Dengan mengambil langkah investigasi yang sama pada bagian sebelumnya (Bab V), ditemukan kata dengan frekuensi tertinggi, yaitu ‘pemerintahan’, ‘daerah’, dan ‘rencana’.



**Gambar 3.**  
Tiga Kata dengan Frekuensi Tertinggi pada Bagian II (Desain Induk IKN)

**Tabel 6.**  
Kolokasi Kata ‘pemerintahan’ pada Bab II (Desain Induk IKN)

menyelenggarakan / penyelenggaraan	<b>pemerintahan</b>	Daerah Khusus IKN	95%
urusan	<b>pemerintahan</b>	pusat	5%

**Tabel 7.**  
Kolokasi Kata ‘daerah’ pada Bab II (Desain Induk IKN)

menyelenggarakan pemerintahan	<b>daerah</b>	Khusus Ibu Kota Nusantara	90%
satuan pemerintahan	<b>daerah</b>	yang bersifat khusus	10%



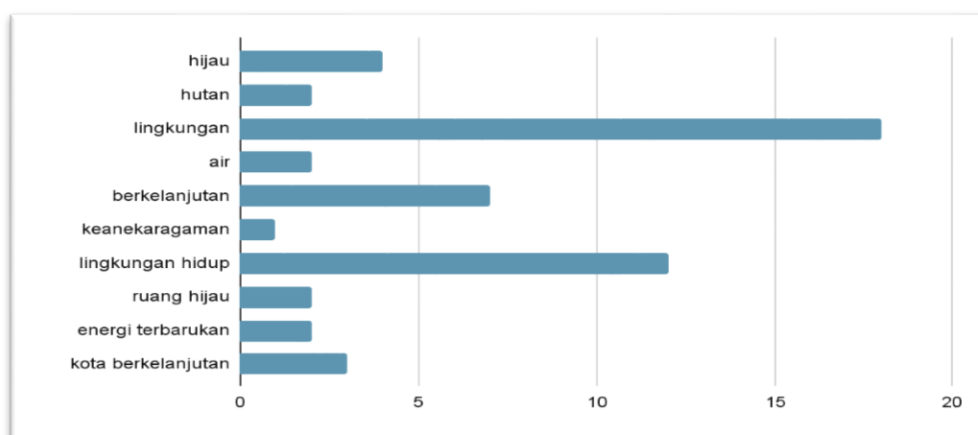
**Tabel 8.**  
Kolokasi Kata ‘rencana’ pada Bab II (Desain Induk IKN)

muatan	<b>rencana</b>	induk Ibu Kota Nusantara	83%
perincian	<b>rencana</b>	induk Ibu Kota Nusantara	14%
perubahan	<b>rencana</b>	tata ruang KSN	3%

Berdasarkan data, tidak ditemukan satu kata kunci pun terkait kelestarian alam. Preferensi topik pembahasan pada bagian ini lebih banyak terkait pemerintahan daerah khusus IKN dan rencana Induk IKN yang terbatas pada deskripsi wilayah, berikut dengan batasnya. Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar, mengingat pada bagian awal dokumen ini termuat prinsip pembangunan IKN, yaitu kesetaraan, keseimbangan ekologi, ketahanan, keberlanjutan pembangunan, kelayakan hidup, konektivitas, dan kota cerdas (*smart city*). Namun dari pembahasan bagian penting terkait tata ruang dan desain induk IKN ini belum ditemukan kata kunci yang bertalian dengan prinsip kedua, yaitu keseimbangan ekologi. Tidak ditemukan jejak linguistik yang mengarah pada tingginya frekuensi kata yang berhubungan dengan ekosistem dan lingkungan. Maka penelitian dilanjutkan dengan memproses kata kunci dari referensi terkait kelestarian alam yang sudah disampaikan di awal pembahasan tulisan ini, yaitu 20 kata kunci kelestarian alam. Berikut adalah hasil penelusuran kata kunci terkait kelestarian alam dalam teks UU No.3 Tahun 2023 tentang IKN.

**Tabel 9.**  
Daftar Kata Kunci Bertema Kelestarian Alam

Kata Kunci	Frekuensi dalam Korpus	Frasa	Frekuensi dalam Korpus
1. hijau	4	1. keanekaragaman hayati	1
2. hutan	2	2. lingkungan hidup	12
3. pohon	0	3. ruang hijau	2
4. biofuel	0	4. teknologi hijau	0
5. konservasi	0	5. sumber daya alam	0
6. lingkungan	18	6. energi terbarukan	2
7. ekosistem	0	7. konsumerisme yang bertanggung jawab	0
8. air	2	8. kota berkelanjutan	0
9. pohon	0	9. pembangunan berkelanjutan	3
10. berkelanjutan	7	10. pertanian berkelanjutan	0



**Gambar 3.**

Diagram Frekuensi Kata Kunci Terkait Kelestarian Alam yang Ditemukan dalam UU No.3 Tahun 2022 Tentang IKN

Pada tabel dan gambar dapat dilihat hasil analisis kata kunci, dimana hanya ditemukan 50% kata kunci terkait kelestarian alam yang termuat dalam teks undang-undang. Tema lingkungan mendapat porsi paling tinggi dengan ditemukannya frekuensi kata ‘lingkungan’ sebanyak 18 kali dan ‘lingkungan hidup’ sebanyak 12 kali. Tema terkait pembangunan berkelanjutan berada pada posisi tengah dengan ditemukannya kata ‘ruang hijau’, ‘energi terbarukan’, ‘kota berkelanjutan’, dan kata ‘berkelanjutan’ sendiri yang banyak berkolokasi dengan pembangunan. Sedangkan tema terkait ekosistem mendapat porsi paling kecil, seperti pembahasan tentang ‘air’, ‘hutan’, dan ‘keanekaragaman’ yang berkolokasi dengan flora dan fauna (hayati).

### **Implikasi Minimnya Frekuensi Kata Kunci terkait Lingkungan: Absennya “Kelestarian Alam” pada Desain Induk dan Tata Ruang IKN**

Berdasarkan data frekuensi dan kolokasi kata yang mengantarkan pemahaman terkait konteks kelestarian alam pada UU No.3 tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa porsinya terlalu sedikit. Satu-satunya kata kunci yang muncul di seratus hits pertama hanyalah kata ‘lingkungan’ yang berada di peringkat ke-78, jauh di bawah kata ‘otorita’ dan ‘pemerintahan’ yang berada di area sepuluh besar, dan kata kunci terkait pembangunan yang berada di peringkat 20 sampai 30. Kata kunci terkait kelestarian alam lainnya ditemukan pada peringkat ke-200 hingga ke-800, dari total 1.099 token yang ada.

Tingkat pembahasan tentang isu lingkungan atau kelestarian alam dalam sebuah undang-undang dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan kepentingan lainnya. Sebuah UU umumnya memiliki fokus utama pada aspek-aspek tertentu seperti ekonomi, pembangunan, atau keamanan sehingga isu lingkungan mungkin tidak menjadi prioritas utama dalam undang-undang tersebut (Kinoshita et al., 2019). Undang-undang sering kali mencerminkan berbagai kepentingan yang beragam dan sering kali terdapat konflik antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial (Kinoshita et al., 2019; Pérez-Cornejo et al., 2023). Hal ini memungkinkan adanya pengurangan perhatian terhadap isu lingkungan. Pengaruh kelompok-kelompok industri atau lobi politik tertentu adalah faktor yang dapat memengaruhi proses pembuatan undang-undang (Shruti et al., 2021) dan mengarah pada penurunan fokus pada kelestarian alam (Rześny–Cieplińska & Szmelter–Jarosz, 2020). Selain itu, perbedaan nilai dan prioritas di antara para pembuat kebijakan dapat mempengaruhi sejauh mana isu lingkungan dimasukkan dalam undang-undang. Beberapa negara di dunia, seperti Finlandia, Denmark, dan Inggris memiliki undang-undang lingkungan yang berdiri sendiri yang mengatur isu-isu lingkungan secara lebih rinci dengan tujuan untuk menjaga kelestarian alam dan menjadi negara yang ramah lingkungan (Shruti et al., 2021). Prinsip ini sebenarnya sudah menjadi prinsip pembangunan IKN seperti yang tertuang pada bagian pembuka UU No.3 tahun 2022 ini. Namun investigasi detail terhadap unsur linguistik menunjukkan Undang-undang ini tidak mengakomodasi isu-isu kelestarian alam dalam batang tubuhnya.

Namun demikian, sebuah undang-undang dapat berubah dari waktu ke waktu dan pihak berwenang memiliki kemampuan untuk memperbarui undang-undang atau mengeluarkan undang-undang tambahan yang lebih fokus pada isu lingkungan jika diperlukan. Sebagian masyarakat Indonesia tentu memiliki kekhawatiran tentang kurangnya perlindungan terhadap lingkungan yang tercermin dalam undang-undang tersebut. Untuk itu, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan. Masyarakat, baik perseorangan maupun kelompok atau komunitas yang peduli dengan isu tersebut dapat berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan, mengadvokasi isu-isu lingkungan, dan berinteraksi dengan para pembuat kebijakan untuk mendorong perubahan yang lebih baik.

### **Implikasi Potensi Kerusakan Alam terhadap Budaya**

Masalah lingkungan merupakan isu yang paling banyak disoroti dalam wacana pembangunan ibu kota. Hal ini dilatarbelakangi oleh peran sentral wilayah Kalimantan Timur dalam menjaga keseimbangan alam, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia. Pembangunan yang masif di

wilayah hutan atau yang berdekatan dengan hutan dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi kelestarian lingkungan.

Hasil analisis korpus terhadap teks UU IKN menunjukkan bahwa isu lingkungan atau kelestarian alam belum banyak diakomodasi dalam dokumen hukum yang merupakan pedoman dan landasan utama pembangunan IKN. Hal ini memunculkan kekhawatiran dan anggapan jika pembangunan IKN belum berpihak kepada alam. Padahal, kerusakan alam yang mungkin ditimbulkan dalam jangka pendek maupun jangka panjang dapat mengancam kehidupan manusia, tidak hanya pada aspek ekonomi, sosial, tetapi juga budaya.

Pada aspek budaya, khususnya kerusakan alam akibat deforestasi atau perubahan struktur dan fungsi hutan dapat mengubah cara pandang manusia terhadap alam. Berbagai pengetahuan lokal – khususnya pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan hutan yang dimiliki dan telah dilestarikan secara turun-temurun oleh nenek moyang pada masyarakat adat misalnya, berpotensi lenyap seiring hilang atau berubahnya fungsi hutan yang mereka tinggali.

Perubahan dan kepunahan nilai-nilai budaya dapat dilacak melalui bahasa, karena bahasa, melalui berbagai istilah dan kosakata merekam berbagai realitas fisik, fenomena, dan pengalaman manusia dalam perspektif ekolinguistik, bahasa bekerja dalam konteks fisik dan sosio-ekologis (Stanlaw, 2020). Jika alam atau hutan sebagai tempat berpijak dan menggantungkan hidup mengalami perubahan atau bahkan hilang, maka berbagai konsep yang terrekam dalam kosakata pada sebuah bahasa juga berpotensi lenyap seiring hilangnya entitas rujukannya di dunia fisik. Kosakata terkait flora herbal atau obat-obatan, kosakata yang mengandung konsep-konsep pelestarian alam dan kearifan lokal, misalnya, akan hilang dari komunitas penggunanya jika ekosistem yang menjadi referensi kosakata tersebut tidak dapat dijumpai lagi. Kehilangan tersebut tentu merupakan kerugian yang sangat besar karena ia mengandung segala pengetahuan yang berharga bagi peradaban. Meskipun tidak dapat dikalkulasi dalam bentuk nominal layaknya kerugian material, hilangnya pengetahuan lokal yang dimiliki suatu masyarakat adalah kerugian immaterial yang tak ternilai harganya.

## **PENUTUP**

Salah satu bagian penting dari Undang-undang No.3 Tahun 2023 tentang IKN adalah hukum yang memuat kelestarian alam dan lingkungan yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Namun sayangnya dalam penelusuran dalam perspektif bahasa, khususnya dengan data statistik terkait kosa kata dengan topik lingkungan, tidak ditemukan signifikansi topik lingkungan yang terfasilitasi dalam isi Undang-undang No.3 Tahun 2023, khususnya peraturan terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Dalam proses hukum ini, bahasa yang kuat dan lugas diperlukan. Oleh karena itu, bahasa Indonesia bukan hanya alat untuk berkomunikasi secara efektif, tetapi juga dasar untuk merumuskan dan menerapkan ketentuan lingkungan yang penting dalam undang-undang tentang pembentukan IKN. Bahasa ini memungkinkan pesan lingkungan yang jelas, komunikasi yang efektif dengan semua pemangku kepentingan, dan pelaksanaan regulasi dan undang-undang yang berkelanjutan untuk mempertahankan kelestarian alam di wilayah IKN. Dalam hal frekuensi kata kunci terkait kelestarian alam dalam UU IKN, minimnya kemunculan kata-kata kunci tersebut dikhawatirkan akan berpengaruh pada kurangnya perhatian terhadap alam dalam pembangunan IKN. Padahal, alam merupakan bagian penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik ekonomi, sosial, maupun budaya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al Fajri, M. S. (2017). Hegemonic and Minority Discourses Around Immigrants: A Corpus-Based Critical Discourse Analysis. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, 7(2), 381–390. <https://doi.org/10.17509/ijal.v7i2.8349>
- Al Fajri, M. S. (2019). The Discursive Portrayals of Indonesian Muslims and Islam in the

- American Press: A Corpus-Assisted Discourse Analysis. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, 9(1). <https://doi.org/10.17509/ijal.v9i1.15106>
- Altoaimy, L. (2018). Driving Change on Twitter: A Corpus-Assisted Discourse Analysis of the Twitter Debates on the Saudi Ban on Women Driving. *Social Sciences*, 7(5). <https://doi.org/10.3390/SOCSCI7050081>
- Baayen, R. H. (2008). Analyzing Linguistic Data: A Practical Introduction to Statistics Using R. In *Analyzing Linguistic Data: A Practical Introduction to Statistics Using R*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511801686>
- Baron, A., Rayson, P., & Archer, D. (2009). Word Frequency and Key Word Statistics in Corpus Linguistics. *Anglistik: International Journal of English Studies*, 20(1), 41–67.
- Biro Hukum Kemenkeu. (2022). *Informasi terkait Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN)*. [Kemenkeupedia.Kemenkeu.Go.Id](https://www.kemenkeu.go.id/).
- Carpi, T., & Iacus, S. M. (2020). Is Japanese Gendered Language Used on Twitter? A Large Scale Study. *Online Journal of Communication and Media Technologies*, 10(4). <https://doi.org/10.30935/ojcm/9141>
- Chen, M., & Flowerdew, J. (2018). Introducing Data-Driven Learning to PhD Students for Research Writing Purposes: A territory-wide project in Hong Kong. *English for Specific Purposes*. <https://doi.org/10.1016/j.esp.2017.11.004>
- Fristikawati, Y., Alvander, R., & Wibowo, V. (2022). Pengaturan dan Penerapan Sustainable Development Pada Pembangunan Ibu kota Negara Nusantara. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2).
- Islamiah, M., & Al Fajri, M. S. (2019). Skinny, Slim, dan Thin: Analisis Berbasis Korpus Kata Sifat Identik dan Implikasinya Pada Pengajaran Bahasa Inggris. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 8(1), 19–32. <https://doi.org/10.26499/rnh.v8i1.894>
- Kania, U. (2022). “Snake Flu,” “Killer Bug,” And “Chinese Virus”: A Corpus-Assisted Critical Discourse Analysis of Lexical Choices in Early UK Press Coverage of the COVID-19 pandemic. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 5. <https://doi.org/10.3389/frai.2022.970972>
- Khair, O. I. (2022). Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis pada Pembentukan Undang-Undang ibu Kota Negara. *Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 2(1). <https://doi.org/10.51878/academia.v2i1.1037>
- Kinoshita, A., Mori, K., Rustiadi, E., Muramatsu, S., & Kato, H. (2019). Effectiveness of Incorporating the Concept of City Sustainability Into Sustainability Education Programs. *Sustainability (Switzerland)*, 11(17). <https://doi.org/10.3390/su11174736>
- Kurniadi, A. (2019). Pemilihan Ibu kota Negara Republik Indonesia Baru Berdasarkan Tingkat Kebencanaan. *Jurnal Manajemen Bencana (JMB)*, 5(2), 1–12. <https://doi.org/10.33172/jmb.v5i2.458>
- Lutzky, U., & Lawson, R. (2019). Gender Politics and Discourses of #mansplaining, #manspreading, and #maninterruption on Twitter. *Social Media + Society*, 5(3). <https://doi.org/10.1177/2056305119861807>
- Meyer, B. (2023). Corpus-Based Studies of Public Service Interpreting. In *The Routledge Handbook of Public Service Interpreting*. <https://doi.org/10.4324/9780429298202-7>
- Narayanan, A., Jenamani, M., & Mahanty, B. (2021). Determinants of sustainability and prosperity in Indian cities. *Habitat International*, 118. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2021.102456>
- Nugroho, D. (2022). Bentuk dan Kekhususan Ibu Kota Negara Nusantara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *The Indonesian Journal of Politics And Policy (IJPP)*, 4(1).
- Nuryanto, T. (2015). Menurunnya Penutur Bahasa Indonesia sebagai Lingua Franca. *Al Ibtida: Jurnal Pendidikan Guru MI*, 2(2). <https://doi.org/10.24235/al.ibtida.snj.v2i2.124>
- Otorita IKN. (2023a). *Respons Masukan RUU Perubahan atas UU 3/2022 Tentang IKN |*

Topik: *Hukum & Regulasi*. 21 Agustus 2023.

Otorita IKN. (2023b). *Sekilas IKN*. [Ikn.Go.Id](https://www.ikn.go.id).

Pérez-Cornejo, C., Rodríguez-Gutiérrez, P., & de Quevedo-Puente, E. (2023). City Reputation And The Role of Sustainability in Cities. *Sustainable Development*, 31(3). <https://doi.org/10.1002/sd.2459>

Petchprasert, A. (2021). Utilizing an Automated Tool Analysis to Evaluate EFL Students' Writing Performances. *Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education*, 6(1). <https://doi.org/10.1186/s40862-020-00107-w>

Puspitasari, D. A., & Sukma, B. P. (2022). Portraying the Covid-19 Hoaxes at the Beginning of the Pandemic Through a Corpus-Assisted Discourse Analysis. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 11(2), 243. <https://doi.org/10.26499/rnh.v11i2.5152>

Ramadhani, A. R. (2018). Lingua Franca in the Linguistic Landscape of Gresik Kota Baru (GKB). *Etnolinguist*, 2(2). <https://doi.org/10.20473/etno.v2i2.10569>

Ramadhani, R., & Yusa, D. (2023). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Resiko Kerusakan. *Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*, 1(3), 144–152. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i3.44008>

Rukayah, R. S., Vania, S. A., & Abdullah, M. (2023). Old Semarang City: the Sustainability of Traditional City Patterns in Java. *Journal of Asian Architecture and Building Engineering*, 22(1). <https://doi.org/10.1080/13467581.2021.2024196>

Rześny–Cieplińska, J., & Szmelter–Jarosz, A. (2020). Environmental Sustainability in City Logistics Measures. *Energies*, 13(6). <https://doi.org/10.3390/en13061303>

Sa'adah, N., Hayyat, M. R., & Fevria, R. (2022). Analisis Issue dalam Etika Lingkungan Terkait IKN. *Prosiding SEMNAS BIO 2022*, 421–430.

Sagredos, C. (2019). The Representation of Sex Work in the Greek Press: A Corpus-Assisted Critical Discourse Analysis. *Journal of Language and Sexuality*, 8(2). <https://doi.org/10.1075/jls.18012.sag>

Shiroda, M., Fleming, M. P., & Haudek, K. C. (2023). Ecological Diversity Methods Improve Quantitative Examination of Student Language in Short Constructed Responses in STEM. *Frontiers in Education*, 8. <https://doi.org/10.3389/educ.2023.989836>

Shruti, S., Singh, P. K., & Ohri, A. (2021). Evaluating the Environmental Sustainability of Smart Cities in India: the Design and Application of the Indian Smart City Environmental Sustainability Index. *Sustainability (Switzerland)*, 13(1), 1–19. <https://doi.org/10.3390/su13010327>

Solan, L. M., & Gales, T. (2018). Corpus Linguistics as a Tool in Legal Interpretation. *Brigham Young University Law Review*, 2017(6), 1311–1357. <https://doi.org/10.54254/2753-7064/38/20240160>

Sopjani, V., & Hamiti, V. (2023). Challenges in the Translation of Legal Texts: the Case in Kosovo. *Comparative Legilinguistics*, 52. <https://doi.org/10.14746/cl.52.2022.15>

Stanlaw, J. (2020). Ecolinguistics. *The International Encyclopedia of Linguistic Anthropology*, 1972, 1–2. <https://doi.org/10.1002/9781118786093.iela0110>

Susiati, S., & Iye, R. (2018). Kajian Geografi Bahasa dan Dialek di Sulawesi Tenggara: Analisis Dialektometri. *Gramatika: Jurnal Ilmiah Kebahasaan Dan Kesastraan*, 6(2). <https://doi.org/10.31813/gramatika/6.2.2018.154.137--151>

Toli, A. M., & Murtagh, N. (2020). The Concept of Sustainability in Smart City Definitions. In *Frontiers in Built Environment* (Vol. 6). <https://doi.org/10.3389/fbuil.2020.00077>